

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Golongan Karya atau lebih dikenal dengan Partai Golkar dalam perjalanan politiknya sudah berjalan cukup lama, terbukti Partai Golkar adalah salah satu partai yang sudah berdiri dan mengikuti pemilihan umum dari awal pemilihan yaitu dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto). Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs resmi Partai Golkar (www.golkardki.net) menyatakan bahwa pada pemilu pertama, Partai Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh Provinsi. Sampai pada saat ini Partai Golkar masih berada dalam susunan Partai Politik yang di anggap masih berkompeten dan berhasil menciptakan para tokoh politik yang menjadikan Partai Golkar sebagai dasar dalam proses peningkatan etika politik di Indonesia.

Hal di atas diperkuat dengan data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pusat (KPU) Tahun 2009, tercatat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 total sebanyak 72,7% dari politisi yang ada di Indonesia adalah politisi yang menjadikan visi golkar sebagai dasar peningkatkan politik di Indonesia, dan sebanyak 35,8% politisi keluaran partai golkar mendirikan partai baru dengan program yang diadopsi dari Partai Golkar sebagai dasar utama untuk meningkatkan etika politik kader di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan program dari Partai Golkar sangat berpengaruh dalam peningkatan etika politik di Indonesia.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis dari beberapa narasumber DPD Partai Golkar Kota Bandung, diantaranya Bapak Yayat yang menjabat sebagai Ketua Sekretaris menyatakan bahwa terjadi penurunan etika politik pada Partai Golkar, hal itu dibuktikan dengan adanya Kader Partai Golkar yang melakukan pelanggaran etika berupa pelanggaran norma asusila dan pelanggaran dalam kasus korupsi yaitu FA dan YZ yang tersandung kasus asusila dan terpidana kasus

korupsi dana PON ke XVIII (www.antaraneews.com 27-02-2013) pada Tahun 2012 . Adanya penurunan pada etika politik pada Kader Golkar membuat membuat Partai Golkar mengalami Delegitimasi Moral atau kehilangan atau penurunan keapsahannya pada masyarakat maupun dari Partai Golkar sendiri. Hal itu memberikan dampak negatif berupa penurunan kepercayaan pada Partai Golkar karena turut membawa Partai Golkar sebagai Partai yang menaungi kader-kader tersebut.

Pada saat krisis kepercayaan masyarakat terhadap kader bergejolak, kader akan kehilangan legitimasi moral di tengah masyarakat yang akan menyebabkan ketidakpercayaan pada partai yang menaungi kader itu sendiri. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa sebuah partai politik yang mengikuti pemilihan umum diharuskan untuk memenuhi ambang batas 3,5% dari keseluruhan suara (Putusan MK pada Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2012) agar terus bisa berada dalam sistem partai Indonesia. Maka sesuai dengan Putusan MK tersebut Partai Golkar harus turut menata sistem *intern* dalam Partai Golkar, utamanya sistem dalam peningkatan etika para kader.

Etika Politik pada Kader sendiri memiliki arti sebagai sebuah filsafat moral atau pedoman dalam berpolitik yang baik sesuai dengan aturan dan tanggungjawab bagi para kader. Saat kader memiliki etika politik yang baik, maka tidak akan terjadinya penegasian fatsu politik atau pengingkaran terhadap etika politik. Etika politik dianggap sangat berpengaruh dalam *attitude* para kader, hal itu diperkuat oleh pernyataan dari pengamat politik Herry FK (www.politik.kompasiana.com 03-01-2013) yang menyatakan bahwa:

“Dalam berpolitik pun ada kode etik yang mendasar yaitu Integritas dan etika politik yang menjadi cerminan bagi *attitude* sang Politikus, dan seorang Politikus sesungguhnya adalah penjual integritas diri *full packet* sehingga seorang Politikus dapat dikatakan sukses apabila mampu menjual setinggi-tingginya integritas dirinya.”

Sesuai dengan pernyataan di atas maka dapat dideskripsikan bahwa etika politik menjadi salah satu point penting dalam tingkah laku para kader partai. Kader dan Etika Politik merupakan satu *packaging* yang tidak bisa lepas satu

sama lainnya dan saling memiliki keterkaitan. Selain itu etika politik menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan politik dilembaga maupun di masyarakat.

Partai dianggap sebagai wadah atau tempat terjadinya pendidikan politik pada kader. Pendidikan politik yang diberikan mengacu pada etika politik bagi para kader, maka hasil dari pendidikan politik yang diberikan partai pada kader membuat kader memiliki tugas untuk mengantarkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Beranjak dari pemahaman di atas Partai Golkar dituntut untuk memiliki kader yang beretika serta bermoral yang baik, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran. Maka dari itu para kader Partai Golkar dituntut agar memiliki sifat *amanah* dalam menjalani setiap tugasnya.

Sesuai dengan perubahan sistem politik yang ada di Indonesia kader partai politik bisa berasal dari berbagai kalangan, contohnya dari kalangan publik figure yaitu Tantowi Yahya dengan Nurul Arifin, dengan adanya kader dari berbagai golongan yang tidak memiliki dasar etika politik yang kuat membuat partai harus melakukan pendidikan politik pada kadernya agar tidak terjadinya penegasian fatsun politik atau pengingkaran terhadap etika politik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Lailatul Fauziah (2009:121) yang menemukan bahwa:

“Kaderisasi Golkar berbeda dengan kaderisasi partai lain. Kaderisasi Golkar lebih menggunakan sistem *Top Down*, sehingga Partai Golkar dapat memiliki kader dengan hasil yang matang dan tidak memiliki kader yang terlahir secara instan.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kaderisasi politik yang baik akan menghasilkan etika politik yang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kaderisasi dari setiap partai akan memunculkan ciri khas yang berbeda, contohnya Partai Golkar dengan sistem kaderisasi karakterdes yang memuat program “Ujian Kader” yang lebih menitik beratkan pada etika politik kader.

Adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh kader Partai Golkar membuktikan bahwa kader telah keluar dari aturan yang sudah diberlakukan oleh Partai Golkar dalam meningkatkan etika politik. Maka dari itu Partai Golkar

membuat sebuah program yaitu “Ujian Kader” untuk meningkatkan etika politik pada kader.

Dari beberapa data di atas maka peneliti merasa sangat tertarik untuk meneliti Partai Golkar khususnya DPD Partai Golkar Kota Bandung. Setelah penulis mengadakan studi pendahuluan melalui observasi lapangan pada Partai Golkar Kota Bandung yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 113 menunjukkan bahwa Partai Golkar memiliki sebuah program yang khusus menyoroti pada kinerja dan etika politik para kadernya. Perwujudan dalam peningkatan etika politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dapat dibuktikan dengan adanya sebuah program Ujian Kader.

Menurut Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dalam pidatonya (Viva News – 2 Juli 2011) mengatakan bahwa: “Ujian Kader merupakan suatu pemantapan (etika politik) yang dilakukan kepada kader untuk memantapkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.”

Menurut pendapat di atas dapat dideskripsikan bahwa Ujian Kader merupakan sebuah program yang memberikan pemahan dalam peningkatan moral pada kader Partai Golkar khususnya pada peningkatan etika politik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan berpolitik di masyarakat yang dinamis, bertanggungjawab, dan mantap dalam pembangunan kesejahtraannya di lingkup masyarakat.

Ujian Kader merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap para kader yang dilakukan secara berkala dalam setiap bulannya. Ujian kader lebih menitik beratkan pada sebuah ujian atau tugas yang harus dikerjakan oleh para kader terkait dengan masalah etika dilingkungan kelembagaan maupun dilingkungan masyarakat, dan hasilnya akan menunjukkan ukuran etika dari setiap para kader. Ukuran tersebut berupa penilaian dari Partai Golkar secara objektif yang diberikan pada kader yang disesuaikan dengan kapasitas etika yang dimiliki oleh kader.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa materi Program Ujian Kader pada DPD Partai Golkar Kota Bandung?
2. Pendekatan dan metode apa yang diterapkan Partai Golkar kepada para kader untuk mensosialisasikan Program Ujian Kader pada DPD Partai Golkar Kota Bandung?
3. Apa kendala yang dihadapi Partai Golkar dalam menerapkan Program Ujian Kader pada DPD Partai Golkar Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memecahkan kendala yang dihadapi dalam menerapkan Program Ujian Kader pada DPD Partai Golkar Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas bagaimana proses sampai kendala dalam pengaplikasian program “Ujian Kader” yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam meningkatkan etika politik para kader.

2. Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui materi yang terkandung dalam Program Ujian Kader dalam meningkatkan etika politik para kader.
- b. Mengetahui pendekatan dan metode DPD Partai Golkar dalam mensosialisasika serta menerapkan Program Ujian Kader terhadap para Kader dalam upaya peningkatan etika politik.
- c. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar dari berbagai aspek di lapangan maupun secara teknis dalam mensosialisasi serta menerapkan Program Ujian Kader.
- d. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam memecahkan kendala yang terjadi saat mensosialisasi serta menerapkan Program Ujian Kader sehingga terlaksana dengan baik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran beretika dalam politik bagi Masyarakat Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu kajian ini diharapkan dapat menjadikan panduan bagi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjadikan masyarakat atau khususnya mahasiswa sebagai Warga Negara yang beretika dalam hal berpolitik maupun dalam berpartisipasi politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kader parpol:

- 1) Kader dapat lebih meningkatkan etika dalam berpolitik di lingkup Kelembagaan dan di Masyarakat.
- 2) Kader dapat lebih mengevaluasi diri dalam kelebihan dan kekurangan pada etika politik yang dimilikinya.

b. Bagi Partai Politik (Partai Golkar)

- 1) Mengetahui lebih jelas mengenai kelebihan serta kekurangan program “Ujian Kader” sehingga bisa memperbaiki program “Ujian Kader” untuk lebih efektif dalam pelaksanaannya.
- 2) Dapat dijadikan sebagai panduan umum bagi Partai Golkar dalam menerapkan program Ujian Kader bagi para kader partai agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat mengimplementasikan nilai-nilai etika dalam berpolitik di kehidupan politik masyarakat umum.
- 2) Dapat turut serta membantu Partai Golkar dalam meningkatkan etika politik para kader dengan memberikan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan program yang sudah ada.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Partai Poitik

Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang memiliki ideologi tersendiri dengan tujuan yang disesuaikan dengan kepentingan partai politik dan beranggotakan individu-individu yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. (Cecep Darmawan, 2008: 63)

Melihat dari pengertian partai politik di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan tersendiri dan berbeda pada setiap partainya dengan beranggotakan individu-individu yang memiliki tujuan yang sama. Maksud dan tujuan yang berbeda pada setiap partai yang membuat satu partai berbeda dengan partai lainnya.

2. Etika Politik

Franz Magnis Suseo menjelaskan bahwa “Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.” (Etika Politik 2003). Menurut pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Etika Politik adalah sebuah pedoman mengenai moral dalam hal berpolitik seorang individu yang diaplikasikan dikehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika politik adalah tata cara berpolitik yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini lebih dititik beratkan pada tata cara berpolitik yang dilakukan oleh kader Partai Golkar.

3. Ujian Kader

Ujian Kader merupakan suatu pemantapan (etika politik) yang dilakukan kepada kader untuk memantapkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (Aburizal Bakrie)

Dilihat dari pengertian di atas maka Ujian Kader adalah sebuah program yang diberikan kepada kader dari Partai Golkar yang bertujuan untuk meningkatkan etika para kader dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap wilayah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas dan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif lebih meneliti tentang kondisi sebuah objek tertentu, dan mengharuskan peneliti menjadi instrumen utama untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mencari data atau informasi melalui observasi dan wawancara.

Pendekatan yang penulis pilih dirasa sangat tepat untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif, serta penelitian ini memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang penulis kaji memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus dilakukan untuk meneliti suatu subjek yang sangat sempit, namun ditinjau dari sifat penelitiannya lebih meneliti suatu subjek secara mendalam dan lebih terpaparkan. Ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian studi kasus meneliti lebih mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, kendala, dan solusi yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam penerapan Program “Ujian Kader”.

Peneliti memandang metode ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menggambarkan secara mendalam mengenai materi, kendala, dan upaya yang dimiliki oleh program Ujian Kader Partai Golkar. Selain itu metode ini hanya bisa dilakukan pada objek yang memiliki permasalahan yang tidak dimiliki oleh objek lain. Contohnya program ujian kader yang tidak dimiliki oleh partai yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Moleong, (2000, 150) menyatakan bahwa,

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Peneliti menggunakan teknik wawancara karena dianggap lebih luwes dalam penyampaian pertanyaan yang diajukan. Susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang peneliti ajukan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik politik, sosial, dan budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) responden yang dihadapi.

Wawancara yang akan peneliti lakukan akan ditujukan kepada Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Bandung, Kader DPD Partai Golkar Kota Bandung, dan masyarakat dalam hal ini adalah pemuda dan instansi. Wawancara ini berfungsi untuk mengetahui program Ujian Kader dalam segi metode penerapan, kendala yang dihadapi, serta upaya dalam pemecahan kendala dalam penerapan Ujian Kader Partai Golkar.

b. Observasi

Nazir, (1983:65) mengungkapkan bahwa,

“Metode survey (observasi) adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.”

Dengan melakukan observasi secara langsung, tujuan dari metode studi kasus dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap fakta-fakta secara lebih mendalam dan luasa.

Vina Yuliana, 2013

KAJIAN TENTANG PROGRAM “UJIAN KADER” PADA PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN ETIKA POLITIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata dan jelas tentang materi Ujian Kader, metode dan pendekatan yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk mensosialisasikan Program Ujian Kader, kendala serta pemecahan masalah yang dilakukan oleh Partai Golkar pada Program Ujian Kader. Selain itu observasi dilakukan untuk memperoleh data secara akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Dokumentasi

Arikunto (1993:202) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.

Studi dokumentasi dimaksud untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan, dan manfaat penelitian. Dokumentasi yang dapat dikumpulkan berupa foto, peta konsep, gambar, serta arsip-arsip yang dapat memperkuat penelitian yang penulis lakukan.

d. Studi Literatur

Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Peneliti menggunakan berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal dari media cetak dan media internet mengenai Program "Ujian Kader" Partai Golkar sebagai bahan dan referensi dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting, karena pengolahan serta analisis data yang memberikan makna dari penelitian yang sedang diteliti. Data yang terkumpul dari para responden diolah dan dideskripsikan dalam bentuk laporan. Nasution (2003:129) berpendapat bahwa:

“Tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua peneliti, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.”

Dari pendapat diatas, maka dipaparkan bahwa dalam pengolahan data hasil dari penelitian memiliki langkah-langkah tertentu sehingga data bisa berubah menjadi sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut (Nasution:2003):

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data lebih menitik beratkan pada poin-poin yang akan peneliti teliti. Reduksi data memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai data yang dikumpulkan.

Dalam tahap reduksi data penulis mulai mengumpulkan data yang berkaitan dengan program Ujian Kader. Data tersebut berupa materi, cara pelaksanaan Ujian Kader, dan evaluasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam memperbaharui program Ujian Kader.

2. Display Data

Display data adalah suatu penyajian data yang diteliti sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data disajikan berupa uraian atau laporan yang sesuai dengan hasil penelitian.

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan program Ujian Kader, penulis mulai menarik kesimpulan awal atau hipotesis awal sebagai acuan penelitian yang akan diteliti. Setelah kesimpulan awal ditarik, maka penulis melakukan tindakan selanjutnya berupa penyesuaian data yang tersedia dengan fakta yang terjadi dilapangan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah satu tahap akhir dalam proses penyusunan sebuah penelitian dalam penarikan makna dari data yang telah di peroleh. Data awal yang diperoleh (data mentah) diolah sehingga menjadi sebuah kategori data. Setelah semua terkategori maka data di analisis dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam tahap verifikasi penulis mengambil kesimpulan secara seutuhnya yang dihasilkan dari *crossing check* data yang terkumpul dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Dimana dalam tahap ini garis besar permasalahan akan terlihat dan langsung diberikan solusinya,

Berdasarkan tahap-tahap tersebut penulis mendapatkan sebuah data secara lengkap mengenai Program Ujian Kader dalam Meningkatkan Etika Politik.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah DPD Partai Golkar Kota Bandung, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 113 Tlp 022 730214. Alasan memilih lokasi penelitian pada Partai Golkar karena program yang dimiliki oleh Partai Golkar tidak dimiliki oleh partai lain. Selain itu Program Ujian Kader adalah program dari Partai Golkar yang pertama kali menyoroiti masalah mengenai etika politik kader

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Umum dan Kader Partai Golkar serta masyarakat yang turut merasakan perubahan dari Program “Ujian Kader” Partai Golkar.

- a) Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Bandung dijadikan sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Program Ujian Kader yang dimiliki oleh Partai Golkar.
- b) Kader dijadikan sebagai subjek utama karena kader merupakan ujung tombak dari sebuah partai dalam mengimplementasikan program yang

dibuat oleh partai pada masyarakat. Kader yang dipilih untuk dijadikan *sample* berjumlah 3 orang kader Partai Golkar Kota Bandung.

- c) Masyarakat dianggap lebih cermat dan kritis dalam menanggapi permasalahan yang dimiliki oleh sebuah partai, karena masyarakatlah yang merasakan efek dari program yang dimiliki oleh sebuah partai. Masyarakat disini lebih dititik beratkan kepada Mahasiswa sebagai pengamat politik yang paling kritis dan warga masyarakat Jl. Pelajar pejuang No 45 sebagai masyarakat yang berada dalam lingkup Partai Golkar.

